

**PELAKSANAAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS  
SENGKETA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Oleh

**ANDI TENRI ANGKI NAZARUDDIN**

**NIM. 10500109016**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2013**

**HALAMAN JUDUL**

**PELAKSANAAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS  
SENGKETA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR**

**OLEH**

**ANDI TENRI ANGKI NAZARUDDIN**

**NIM. 10500109016**

**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)

Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2013**

## KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling mulia diucapkan selain puji dan syukur kehadirat Allah swt karena berkat rahmat dan inayah-Nya sehingga penulis selalu semangat dan kuat menyelesaikan karya ilmiah penulisan skripsi ini yang berjudul Pelaksanaan Asas Kebebasan Hakim dalam Memutus Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW serta keluarga yang tercinta dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau.

Adapun maksud dari penulisan tugas akhir ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Dalam penulisan ini penulis mendasarkan pada ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama ini, khususnya dalam pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar serta hasil penelitian penulis di Pengadilan Negeri Makassar.

Dalam penulisan skripsi ini saya banyak mendapat bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, baik secara spiritual maupun moril. Maka atas bantuan yang telah diberikan kepada saya, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yth. Bapak Rektor UIN Alauddin Makassar, Dekan Fakultas Syariah, Pembantu Dekan, dan Segenap pegawai Fakultas yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Yth. Bapak Dr. Abd. Halim Talli, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum sebagai Pembimbing I yang telah memberikan banyak kontribusi ilmu terkait judul yang diangkat penulis dan Yth. Ibu Erlina. SH., MH, Sebagai Dosen Tetap Syariah Dan hukum sekaligus sebagai selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak pengetahuan terkait judul yang diangkat penulis
3. Yth Bapak Ketua Jurusan Ilmu Hukum Dr. Hamsir, SH., M. Hum, dan Ibu Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum Istiqamah, SH., MH, serta Staf Jurusan Ilmu Hukum Kak Herawaty, SH., yang telah membantu dan memberikan petunjuk terkait yang berkaitan dengan urusan akademik sehingga penulis lancar dalam menyelesaikan semua mata kuliah dan penulisan karya ilmiah ini.
4. Kedua Orangtua Ku yang saya hormati Bapak Andi Nazaruddin Zainal. S.sos., MM. dan Ibu. dr. Hj. Juliarna Gaffar yang telah memberikan kasih sayang sepanjang masa, memberikan segalanya untuk dapat memenuhi segala kebutuhan

5. Adik - adik saya yang tercinta : Andi Muh. Dirga Nazaruddin, Andi Muh. Rizal Nazaruddin, dan Andi Muh. Ariansyah Nazaruddin yang telah banyak membantu hingga terselesainya Kuliah S1 ini, Ashilla Anastasya, Amelia Dewi Pontoh, Inayah Rasyidah, Lidia Pratiwi, Angeline Frieda Kongsuadiputra, Vini Arfianti, Febriametra Olgha, dan Arel Edhytia yang telah memberikan motivasi dan selalu mendukung saya.
6. Sahabat-sahabatku Nisa, Tiar, Ayha, Eni, Imhe, Wiwin, Sufirman, Rustam dan semua kawan-kawan di Jurusan Ilmu Hukum angkatan 2009 yang selama ini telah bersama-sama menyelesaikan studi perkuliahan sampai selesai penyusunan skripsi ini dan semoga persahabatan akan selalu langgeng selamanya.
7. Teman-Teman seperjuangan di Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Hukum 2011 dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), terima kasih atas bantuan dan dukungannya.
8. Yth Bapak Masdin, SH. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar selaku pembimbing saya di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang menyempatkan banyak waktu, tempat, dan bantuannya selama penelitian saya.
9. Yth Bapak. Andi Hasanuddin, SH., MH. Kepala Panmud Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, yang telah memberikan bantuan sampai terselesainya skripsi ini.
10. Dan terakhir kepada diri penulis sendiri yang sampai saat ini masih tegar, kuat dan semangat dalam menghadapi proses penyelesaian karya ilmiah yang merupakan tugas akhir dari strata S1.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan Inayah-Nya kepada kita semua. Akhir kata penulis berharap kiranya tugas penulisan karya ilmiah ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata, dan dapat dipakai sebagai masukan bagi pemerintah dalam hal sumbangan sumbangis pemikiran terhadap lembaga pendidikan yang terkait.

Amin yaa Robbal Aalamin.....

Penulis

Andi Tenri Angki Nazaruddin

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Sistematika Penulisan.....	9
E. Defenisi Operasional.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Landasan Teori .....	13
1. Pengertian Hakim .....	13
2. Pengertian Peradilan .....	15
3. Tugas dan Wewenang Hakim .....	17
4. Kedudukan Hakim .....	20
5. Penemuan Hukum oleh Hakim .....	21
6. Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan .....	23

7. Kewajiban dan Tanggung Jawab Hakim Peradilan Tata Usaha Negara .....	23
8. Asas Kebebasan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara .....	28
B. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum .....	29
C. Pengaturan tentang Kebebasan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Memutus Sengketa .....	32
D. Kerangka Pikir .....	33
E. Diagram Kerangka Pikir .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Jenis Penelitian .....	37
B. Lokasi dan Waktu penelitian .....	37
C. Polpulasi dan Sampel .....	38
D. Jenis Dan Sumber Data .....	38
E. Tenik Pengumpulan Data .....	39
F. Teknik Analisis Data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Kebebasan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam Memutus suatu Sengketa.....	42
B. Pelaksanaan Asas Kebebasan Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar .....	49
C. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kebebasan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam Memutus suatu Sengketa .....	54

<b>BAB V P E N U T U P</b> .....	59
D. Kesimpulan.....	59
E. Saran .....	60

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **ABSTRAK**

Nama Penyusun : Andi Tenri Angki Nazaruddin

NIM : 10500109016

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : “Pelaksanaan Asas Kebebasan Hakim dalam Memutus Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar”

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kekuasaan seorang hakim dalam memutus suatu perkara, bagaimanakah cara pelaksanaan asas kebebasan seorang hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus Sengketa Tata Usaha Negara, faktor apa sajakah yang mempengaruhi seorang hakim dalam memutus suatu perkara, dan apakah sudah sesuai dengan Asas Kebebasan Hakim, serta pelaksanaan asas kebebasan hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dan penulis mengambil data yang diperoleh secara dari hasil wawancara langsung terhadap narasumber di lapangan serta berupa data lainya yang diperoleh melalui kepustakaan yang relevan dengan objek penulisan yaitu literatur dan peraturan perundang – undangan.

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi kebebasan hakim yang paling dominan adalah faktor pengetahuan seorang hakim sebagai penegak hukum, faktor budaya dari seorang hakim, dan faktor ekonomi dan seorang hakim. Secara umum analisis menunjukkan dalam memutus sengketa, seorang hakim memutus suatu perkara merupakan personifikasi dari kemandirian kekuasaan kehakiman, tidaklah berada dalam ruang kosong tetapi ia dibatasi oleh beberapa rambu-rambu, yaitu akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi, dan pengawasan (kontrol).

Dari hasil penelitian tentang Pelaksanaan Asas Kebebasan Hakim dalam Memutus Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, maka dapat disimpulkan bahwa Kebebasan Hakim pada PTUN Makassar, telah terwujud dalam memutus sengketa, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang, dan dari beberapa faktor yang telah mempengaruhi seorang hakim dalam memeriksa dan memutus suatu sengketa yang dipertanggungjawabkan kepadanya ialah tentang pengetahuan seorang hakim terhadap aturan hukum yang masih minim.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Negara Indonesia sebagai negara hukum bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan tertib. Oleh karena itu dijamin persamaan kedudukan masyarakat di depan hukum. Akan tetapi pelaksanaan berbagai fungsi untuk menjamin persamaan kedudukan tersebut dan hak perorangan dalam masyarakat harus sesuai dengan pandangan hidup serta kepribadian negara dan bangsa berdasarkan Pancasila, sehingga tercapai keselarasan, keserasian, keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat.

Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut, sesuai dengan sistem yang dianut dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945, pemerintah melalui aparaturnya di bidang Tata Usaha Negara, diharuskan berperan aktif dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang mencerminkan persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum melalui perlakuan yang adil dan non diskriminatif. Prinsip semua orang mempunyai kedudukan sama dalam hukum dapat ditegakkan secara konsisten tanpa diskriminasi berdasarkan prestasi sosial dan status sosial. Oleh karena itu preferensi dan intervensi aspek-aspek tersebut menyebabkan kebebasan atau kemerdekaan hakim dalam memutuskan perkara sulit diaplikasikan dalam realitas yang sebenarnya, padahal kebebasan atau kemerdekaan hakim merupakan aspek yang

sangat fundamental untuk menegakkan prinsip semua orang sama di depan hukum dan intervensi dari aspek non hukum menyebabkan keadilan menjadi barang yang diperjualbelikan dengan mudah dapat teratasi dengan baik.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 telah menyebutkan secara tegas mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri dari campur tangan kekuasaan lain, dengan ditindaklanjuti undang-undang tersebut diberikan kewenangan dan keluasan serta kebebasan bagi hakim untuk memutuskan perkara tanpa kekawatiran serta ketakutan intimidasi kekuatan eksternal di luar pengadilan. Kebebasan tersebut diberikan kepada hakim dengan maksud dan harapan bahwa putusan tersebut merupakan wujud dari keputusan yang seadil-adilnya bagi yang berperkara karena keputusan yang dikeluarkan adalah berdasarkan keyakinan hakim yang bersumber fakta hukum dan kebebasan yang dimiliki oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan revisi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 merupakan amanat pembangunan yang dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, khususnya memperoleh keadilan hukum sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang adil makmur baik materil dan spiritual serta dalam suasana

---

<sup>1</sup> Ahmad Ali. *Menguak Tabir Hukum – Edisi Kedua* (Jakarta : Ghalia Indonesia), hlm. 93.

kehidupan berbangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis. Hal ini sesuai dengan prinsip kebenaran dan keadilan itu banyak ditemui dalam Al-Qur'an diantaranya firman Allah dalam Q.S. Ali Imran / 3 : 60

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ

*Terjemahannya:*

*“Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, karena itu janganlah engkau (Muhammad) termasuk orang-orang yang ragu.”<sup>2</sup>*

Berdasarkan dalil tersebut diatas hakim dalam memutus perkara hendaklah bersikap adil. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut, penasihat hukum, dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.

Lebih lanjut diatur dalam Q.S. Al-Maidah / 5 : 8 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْلَمُوا اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Terjemahannya:*

*“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu*

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI. *Syaamil Al-Quran The Miracle 15 in 1*. PT. Sygma Examedia Arkanleema. Jakarta. Hal 111.

*untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*<sup>3</sup>

Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.

Di dalam Hadits telah dinyatakan oleh al-Albani dalam ash-Shahihah / 469 yang berbunyi :

فَاعْدِلُوا حَكْمَكُمْ إِذَا

*Artinya:*

*“Apabila kalian memutuskan hukum maka bersikaplah adil!”*<sup>4</sup>

Sesungguhnya, bagi seorang hakim, sikap adil haruslah mendasari setiap perhatian kepada kasus yang ditanganinya, dan seorang hakim semestinya memberikan suatu keadilan kepada masyarakat pencari keadilan.

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI. *Op. cit*, h. 213.

<sup>4</sup> Hadits bersikap adil bagi seorang hakim. 2012. Asysyariah  
<http://asysyariah.com/hadits-bersikap-adil-bagi-seorang-hakim/2012/>

Lebih lanjut dinyatakan dalam Hadits Rosulullah Saw, bahwa:

وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنْ وَيَنْهَى الْقُرْبَىٰ ذِي وَإِتِّاءَ وَالْإِحْسَانَ بِالْعَدْلِ يَأْمُرُ اللَّهُ إِنَّ  
تَذَكَّرُونَ كَمَلَعًا يَعْظُمُ

Artinya:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat. Dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”*<sup>5</sup>

Dimaksudkan baha, kewajiban seorang hakim adalah bersikap adil terhadap diri sendiri, keluarga, dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya (memberi putusan yang adil kepada masyarakat). Bersikap adil terhadap diri sendiri artinya tidak memaksakan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wata’ala. Bahkan, seorang hakim pun harus memerhatikan diri sendiri saat melakukan kebaikan, dengan cara tidak melakukannya melebihi batas kemampuan.

Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan

---

<sup>5</sup> Hadits keadilan seorang hakim. 2009. Asyasyariah  
<http://asyasyariah.com/hadits-keadilan-seorang-hakim/2009/>

standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.

Asas hukum acara pada umumnya, termasuk hukum acara perdata, bahwa dalam pelaksanaannya, inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi apakah ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim. Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya, hanya yang menyelenggarakan proses adalah negara.

Didalam kenyataannya tidak dapat diharapkan bahwa, seseorang hakim mengetahui segala peraturan hukum. Telah ditegaskan bahwa pada hakekatnya seorang hakim hanya diharapkan atau diminta mempertimbangkan benar tidaknya suatu peristiwa atau salah tidaknya seseorang dan memberi putusannya. Oleh karena itu hanya mempertimbangkan benar tidaknya suatu peristiwa, maka pada hakekatnya hakim tidak perlu tahu akan hukumnya.<sup>6</sup>

Hukum atau peraturannya seorang hakim dapat menanyakan kepada ahlinya. Seorang hakim dari Makassar misalnya, yang dipindahkan ke Pengadilan Negeri di Biak dan harus mengadili suatu perkara adat, tidak dapat menolak untuk mengadili perkara tersebut dengan alasan tidak tahu hukumnya. Untuk itu ia dapat memanggil seorang kepala adat atau kepala suku yang mengetahui tentang hukum adat setempat.

---

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. Hal 11.

Berdasarkan keterangan ahli pemangku adat tersebut ia dapat menjatuhkan putusannya. Akan tetapi berhubungan dalam ilmu pengetahuan hukum, pesatnya lalu lintas hukum dan mengingat pula kedudukan hakim atau pengadilan yang merupakan tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan, maka hakim dianggap tahu akan hukum.<sup>7</sup>

Kekuasaan kehakiman ketentuannya diatur dalam UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung. UU No. 4 Tahun 2004 merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan masing-masing peradilan masih diatur dalam undang-undang tersendiri. Dengan UU No. 4 Tahun 2004 ini maka Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.<sup>8</sup>

Didalam Pasal 19 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

“ Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.”

Menurut Yahya Harahap, kebebasan hakim jangan diartikan kebebasan yang tanpa batas dengan menonjolkan sikap arogan dengan memperlak kebebasan untuk

---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo. *Hukum dan Peradilan*. Liberty. Yogyakarta. Hal 7.

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo. *Op. cit*, h. 19.

menghalalkan segala cara, namun kebebasan tersebut relatif dengan acuan. *Pertama*, menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara yang sedang diperiksanya. *Kedua*, menafsirkan hukum yang tepat melalui cara-cara pendekatan penafsiran yang dibenarkan (penafsiran sistematik, sosiologis, bahasa, dan analogis) atau mengutamakan keadilan daripada peraturan perundang-undangan apabila ketentuan Undang-Undang tidak potensial melindungi kepentingan umum.<sup>9</sup> Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib memiliki bekal pengetahuan tentang hukum yang cukup luas, serta pengalaman-pengalaman yang memungkinkan sebagai sarana untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dengan memberikan perasaan keadilan masyarakat, bangsa dan Negara.

Asas kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara menjadi suatu keniscayaan untuk menaikkan citra institusi pengadilan yang mendapatkan banyak sorotan dan kritikan dari berbagai kalangan dengan banyaknya putusan-putusan hakim melukai perasaan keadilan hukum masyarakat, atau dengan kata lain perasaan keadilan tercabik-cabik dengan maraknya mafia peradilan, sehingga perasaan keadilan itu sekarang seperti barang komersil yang diperdagangkan.<sup>10</sup> Hal ini terjadi karena tidak adanya kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara karena banyak dipengaruhi faktor kekuatan eksternal. Putusan-putusan hukum yang

---

<sup>9</sup> Yahya Harahap. 1989. *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan*. Pustaka Kartini. Jakarta. Hal 72.

<sup>10</sup> Sudikmo Mertokusumo. *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Liberty. Yogyakarta.



diputuskan oleh hakim pengadilan merupakan cerminan perasaan keadilan hukum masyarakat yang tertinggi dan apabila putusan itu didasarkan kepada pertimbangan hukum yang benar, adil, berwibawa dan bertanggung-jawab dan berdasarkan perasaan keadilan hukum yang sebenarnya maka terwujudlah institusi pengadilan sebagai simbol ditegakkannya kebenaran dan keadilan. Atau dengan kata lain sesungguhnya kehormatan dan wibawa institusi pengadilan sangat ditentukan oleh putusan-putusan hakim pengadilan yang didasarkan pada kebebasan hakim. Namun faktanya banyak putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim karena adanya faktor yang sangat mempengaruhinya terutama faktor pengaturan internal yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

Di sisi lain dalam pelaksanaan kebebasan hakim dapat dilihat dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam hal bertanggung jawab, bahwa: “bertanggung bermakna kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut. Contoh kasus yang terjadi pada salah satu anggota Partai di kota Bulukumba dipecat oleh ketua partainya (DPP Golkar – Cab. Sulsel). Pengadilan Tata Usaha Negara ( untuk selanjutnya disingkat PTUN ) tetap memisahkan kasus Golkar dan menetapkan putusan lain tanpa terpengaruh oleh kekuatan politik ataupun pemerintah, namun tidak dapat dipungkiri kalau kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara juga

sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik ataupun pemerintah, sehingga masyarakat ataupun para pihak merasa dirugikan oleh keputusan Pengadilan.<sup>11</sup>

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan yang menjadi pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaturan tentang kebebasan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus suatu perkara ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan asas Kebebasan Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ?
3. Faktor – Faktor apakah yang mempengaruhi kebebasan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus suatu perkara ?

### ***C. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebebasan hakim PTUN dalam memutuskan suatu perkara.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan asas kebebasan hakim di PTUN Makassar.

---

<sup>11</sup> Hamsah. 2012. *Koran Harian Fajar*. Makassar.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebebasan hakim PTUN dalam memutuskan suatu perkara.

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan masukan atau kontribusi positif kepada seluruh pengembang khasanah ilmu hukum.
2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi atau masukan terhadap para penegak hukum dan praktisi hukum khususnya para hakim.

#### ***D. Sistematika Penulisan***

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan dan definisi operasional.

BAB II KAJIAN PUSTAKA Dalam bab ini berisi tentang landasan teori tentang pengertian Hakim, pengertian Peradilan, Tugas dan wewenang serta kedudukan hakim, Penemuan Hukum Oleh Hakim, peranan Hakim dalam mewujudkan peradilan, Kewajiban dan tanggung jawab hakim peradilan Tata Usaha Negara, Asas kebebasan hakim peradilan Tata Usaha Negara, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum, dan pengaturan Tentang Kebebasan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Memutus Sengketa.

. Bab ini juga berisi karangka pikir dan bagan karangka pikir.

BAB III METODE PENELITIAN Dalam bab ini berisi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini penulis akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya : Pertama Kebebasan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus suatu perkara. Kedua, Faktor – Faktor yang mempengaruhi kebebasan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus suatu perkara.

BAB IV PENUTUP Dalam bab ini berisi kesimpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

### *E. Defenisi Operasional*

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pembaca terhadap variabel-variabel atau kata-kata dan istilah-istilah teknis yang terkandung dalam judul skripsi ini maka penulis menjelaskan beberapa istilah dalam judul ini sebagai variabel:

- a. Kebebasan dan keleluasan atau kemampuan melakukan tindakan secara leluasa tanpa ada tekanan psikis.
- b. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.
- c. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara.
- d. Bebas adalah keleluasaan atau kemandirian untuk melakukan suatu tindakan
- e. Kurang Bebas adalah ketidakleluasaan atau kemandirian dalam melakukan suatu tindakan.
- f. Tidak Bebas adalah tidak adanya keleluasaan atau kemandirian untuk melakukan suatu tindakan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### ***A. Landasan Teori***

##### **1. Pengertian Hakim**

Dalam rangka untuk memperoleh pengertian tentang hakim maka perlu dikemukakan berbagai definisi yang dikemukakan oleh yuris, namun sebelumnya akan dikemukakan pengertian dari segi yuridisnya, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, dalam Pasal 31 dinyatakan bahwa :

“ Hakim adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang”.

Lebih lanjut dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dinyatakan bahwa:

“Hakim Pengadilan adalah Pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman”.

Menurut Yahya Harahap, mengatakan hakim adalah :

“ Hakim adalah orang yang ditentukan oleh penguasa dan menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan-persengketaan” keberadaan hakim dalam masyarakat sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang

timbul dalam kehidupan bermasyarakat yang membutuhkan bantuan hukum guna untuk memecahkan masalah yang sedang di hadapinya”.<sup>1</sup>

Bagi hakim dalam mengadili suatu suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinannya terjadi suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya.<sup>2</sup> Menurut John Z. Loudee, dalam menetapkan hukum begitu mudah tetapi sebaliknya menemukan ketentuan hukum dalam undang-undang pada suatu perkara tidaklah selalu gampang. Dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusannya hendaklah mempertimbangkan dan mengingat rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan tetap memelihara nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, supaya putusan dapat memuaskan.<sup>3</sup>

Dapat diambil satu contoh, 100 orang warga disebuah kelurahan yang bertempat tinggal berdekatan dengan suatu pabrik tekstil. Para warga menuntut pabrik itu karena limbah tekstilnya telah mencemari kesehatan warga dipemukiman tersebut. Dalam kasus ini hakim akhirnya akan menemukan kesalahan dengan menilai

---

<sup>1</sup> Yahya Harahap. 1989. *Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan*. Pustaka Kartini, Jakarta. Hal 39.

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. Hlm 201.

<sup>3</sup> Jhon Z. Loudoe. 1985. *Menemukan Melalui Tafsir dan Fakta*, Bina-Aksara. Jakarta  
([www.pa-pangkalankerinci.go.id/content/article/153-kebebasan-hakim-menurut-ahli-hukum-dalam-menjatuhkan-putusan](http://www.pa-pangkalankerinci.go.id/content/article/153-kebebasan-hakim-menurut-ahli-hukum-dalam-menjatuhkan-putusan))

peristiwa itu keseluruhannya, dan didalam peristiwa itu sendiri akan tersimpul hukumnya.<sup>4</sup>

Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara *a priori* menemukan putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian di konstituir. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Jadi bukannya putusan itu lahir dalam proses secara *a priori* dan kemudian baru dikonstruksi atau direka pertimbangan pembuktiannya, tetapi harus di pertimbangkan lebih dulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai pada putusan.<sup>5</sup>

## 2. Pengertian Peradilan

Pengertian peradilan dijelaskan para sarjana hukum di Indonesia sebagai terjemahan dari *rechtspraak* dalam bahasa Belanda. Sementara menurut Subekti. mengatakan bahwa peradilan adalah: segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan.<sup>6</sup> Sedangkan peradilan menurut Zaini Ahmad Noer adalah: “Daya upaya mencari keadilan atau menyelesaikan peselisihan

---

<sup>4</sup> Masdin, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, wawancara oleh penulis, di Makassar 2 Mei 2013.

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. cit*, hal, 201.

<sup>6</sup> Sigitbudhiarto.files.wordpress.com/2012/04/hk-acara-perdata.ppt



hukum yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam lembaga tertentu dalam peradilan”.<sup>7</sup>

Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengadilan khusus yang berlaku dan diperuntukkan bagi kepentingan orang-orang yang merasa dirugikan haknya sebagai warga negara akibat adanya keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta yang mempunyai wewenang untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan cita-cita Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dipertegas bahwa Hakim dalam lingkungan peradilan tata uaha negara adalah Pegawai Negeri. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan revisi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa hakim pada Pengadilan tata usaha negara adalah Pegawai Negeri. Jadi kedudukan sebagai Pegawai Negeri, seorang Hakim adalah abdi negara dan abdi masyarakat, yang memiliki keahlian dan pengalaman dibidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Adapun kedudukannya sebagai penegak hukum dan pemutus perkara (sengketa) sesuai dengan rasa keadilan.

---

<sup>7</sup> Mungsyat, “Pengertian Peradilan”. [mungsyat.blogspot.com/2012/08/pengertian-peradilan](http://mungsyat.blogspot.com/2012/08/pengertian-peradilan).

Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengadili sengketa-sengketa di bidang tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan oleh pejabat TUN yang bersifat individual, kongkrit, final dan menimbulkan akibat hukum bagi perorangan atau badan hukum swasta. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari dua tingkatan yakni:

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan.
- b. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat banding, yang bertindak dan berwenang untuk memeriksa ulang berkas-berkas yang telah diperiksa dan diputuskan di Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama.

### **3. Tugas dan Wewenang Hakim**

Tugas dan wewenang hakim terkait dengan tugas dan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan ketentuan Pasal ini tetap berlaku walaupun telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2004 dinyatakan sebagai berikut: “pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”.

Sedangkan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dinyatakan bahwa:

- a. Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.
- b. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dinyatakan bahwa:

“Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan” dalam hal:<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Indroharto. 1996. *Usaha Memahami Undang – Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Cet. Kesembilan, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. Hal 53.

- a. Waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Wewenang pengadilan Tata Usaha Negara juga disebut dengan kompetensi atau kekuasaan, kekuasaan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri dari “kekuasaan relatif” dan “kompetensi absolut”. Kekuasaan relative diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaan dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dalam Pasal 6 ditentukan bahwa:

“Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi”.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> “*Dunia Hukum, Tugas Hakim Tidak sebatas Ketok Palu*”, Indobeta, 2007.  
(<http://indobeta.com/dunia-hukum-tugas-hakim-tidak-sebatas-ketok-palu/5006/>)

Jadi tiap-tiap Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai wilayah hukum tertentu atau “yurisdiksi relatif” yang didalamnya meliputi satu Kabupaten atau Kota. Sedangkan kekuasaan absolut adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan dan atau tingkatan Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan yang lainnya.<sup>10</sup>

#### **4. Kedudukan Hakim**

Kedudukan hakim berarti kedudukan peradilan. Peradilan merupakan salah satu tempat untuk menghindari terjadinya kezaliman dalam memutuskan persengketaan, dengan demikian kedudukan hakim merupakan kedudukan yang sangat mulia, apabila dapat dilaksanakan dengan cara yang benar dan adil. Kedudukan yang layak terhadap Peradilan Tata Usaha Negara telah diberikan oleh Negara dengan berlakunya Undang-Undang 14 Tahun 1970 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Sebagaimana telah dijelaskan pada pasal 3 Ayat (1), bahwa: <sup>11</sup>

“Semua Peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan dengan Undang-Undang”.

---

<sup>10</sup> “*Kekuasaan Absolut*”, Wikipedia, 2010. (Id.wikipedia.org/wiki/kekuasaan-absolut)

<sup>11</sup> Dedy Yulfris, “*Kedudukan Hakim*”, Blogspot. 2010.  
(<http://dedyyulfris.blog.com/2010/08/15/kedudukan-hakim/>)

Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia merupakan salah satu peradilan yang diimplementasikan kekuasaan kehakiman terhadap para pencari keadilan. Seorang hakim di dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, tidak lain merupakan:

1. Pengembang Nilai-Nilai yang dihayati oleh Masyarakat
2. Hasil pembinaan masyarakat atau yang lazim disebut sosialisasi
3. Sasaran pengaruh lingkungannya.

## 5. Penemuan Hukum Oleh Hakim

Penemuan Hukum oleh hakim merupakan salah satu wadah yang dapat digunakan oleh hakim untuk mengisi kekosongan hukum, atau menafsirkan kaidah peraturan perundang-undangan yang tidak atau kurang jelas. Penemuan hukum oleh hakim dapat diterjemahkan dalam arti sempit dan dalam arti luas, dalam arti sempit, posisi hakim dalam tugasnya harus mengenal hukum yang dikenalkan dari perundang-undangan dan kebiasaan. Hal ini tercantum dalam putusan HR yang menyatakan bahwa: *“Dat het bestaan ener gewoonte betreffende zodanige bedingen door den rechter kan worden aangenomen onafhankelijk van de wettelijke voorschriften aangaande de bewijslevering”*.<sup>12</sup> Jadi baik hukum yang tertulis maupun tidak, tidak perlu dibuktikan. Terutama hukum acara harus dikuasai oleh hakim, karena merupakan aturan permainan peradilan.

---

<sup>12</sup> HR 7 April 1932, NJ 1932, 1613 dalam Pitlo, *Bewijs en Verjaring*. Hal 14. Terjemahannya: Bahwa adanya suatu kebiasaan mengenai janji-janji semacam itu dapat diterima oleh hakim, lepas dari ketentuan undang-undang mengenai pembuktian.

Penemuan Hukum dalam arti luas, posisi hakim bukan lagi sekedar menerapkan peraturan hukum yang sudah jelas dengan mencocokkannya pada kasus yang ditangani, melainkan sudah lebih luas. Hakim dalam membuat suatu putusan sudah memperluas makna suatu ketentuan Undang-Undang yang dibagi atas konstruksi hukum dan interpretasi hukum.<sup>13</sup>

Penemuan hukum merupakan kegiatan atas berprosesnya hukum di Pengadilan dan hakim sebagai pelaksananya. Undang-undang sebagaimana kaidah pada umumnya, bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga ia harus diketahui oleh warga masyarakat untuk memenuhi “asas orang dianggap tahu akan hukum” menjelaskan ketentuan undang-undang, pada hakikatnya untuk merealisasi agar hukum positif diterima oleh masyarakat. Demikian pula, menafsirkan undang-undang untuk menemukan hukumnya, sebetulnya bukan hanya dilakukan ilmuwan hukum, melainkan *justisiabel* yang mempunyai kepentingan dengan peristiwa yang diperkarakan di Pengadilan sebagai pusat berprosesnya hukum seperti polisi, jaksa, dan pengacara yang juga melakukan interpretasi.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Hal 4.

<sup>14</sup> Muhammad Tahir Azhari. 1992. *Negara Hukum*. Bulan Bintang. Jakarta. Hal 23.

## 6. Peranan Hakim Dalam mewujudkan Keadilan

Seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus bertitik tolak pada dasar hukum yang jelas sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan ketentuan hukum yang benar sesuai dengan citra hukum dalam melaksanakan tugas peradilan yang sebenarnya.<sup>15</sup> Oleh karena itu, penegakan hukum oleh hakim lebih mengutamakan pelaksanaan hukum yang bersifat “responsif” dan tidak lagi bersifat ‘represif’. Oleh karena itu masalah keadilan sangatlah erat kaitannya dengan status keberadaan manusia sebagai pelaku keadilan dipermukaan bumi.<sup>16</sup>

## 7. Kewajiban dan Tanggung Jawab Hakim Peradilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan mengatakan bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.

Hal ini juga telah diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kehakiman, sebagaimana telah dikemukakan pada bab pendahuluan, bahwa kewajiban hakim tidak hanya terbatas mengadili menurut hukum yang ada akan tetapi hakim wajib mencari dan menemukan hukumnya menurut nilai-

---

<sup>15</sup> Publikasi. “*Peranan Hakim*”, PN Medan Kota.  
( <http://www.pn-medankota.go.id/v2/index.php/publikasi/artikel/126-peranan-hakim>)

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. Hlm 117.



nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Seorang hakim hendak mengetahui asas dasar hukum baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun berasal dan timbul dari praktek dalam proses peradilan. Oleh karena itu hal yang sangat penting dan mendasar yang harus diketahui oleh hakim dalam menyelesaikan persengketaan adalah hendaklah seorang hakim benar-benar menjadi abdi Negara, abdi masyarakat serta memiliki integritas yang tinggi, dengan membina dan mengawasi mereka kearah pemantapan kualitas serta moral dan dedikasi yang tinggi pula, sehingga pada jajaran hakim dapat terwujud suatu aparat yang berdisiplin jujur.<sup>17</sup>

Untuk mewujudkan kejujuran bagi lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, hakim harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum baik yang bersumber dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan maupun bersumber dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat melalui jalan penemuan hukum.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Bismar siregar,

“Dipundak para hakim telah diletakkan kewajiban dan tanggungjawab agar hukum ditegakkan, baik berdasarkan hukum yang tertulis, ataupun kepada hukum yang tidak tertulis tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi Peradilan yang berdasar kepada Tuhan Yang Maha Esa”.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Katon Y. Stefanus. 1995. *Mengenai Peradilan Kepegawaian Indonesia*, Pustaka Pelajar. Hal 34.

<sup>18</sup> Bambang Wahyono. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bina-Aksara. Hal 2.

Hakim merupakan pencari nilai-nilai atau norma-norma hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Seorang hakim ketika ia hendak memutus perkara seharusnya ia terlebih dahulu secara langsung mengenal, merasakan, dan menyelami perasaan hukum dan keadilan yang tumbuh dalam masyarakat sehingga dapat memberikan putusan hukum terhadap orang yang bersengketa.<sup>19</sup>

Menurut Yahya Harahap, bahwa seorang hakim diperhadapkan dengan perkara-perkara baginya tidak diperkenankan berdiam diri, melainkan harus mencari landasan hukumnya. Jelaslah bahwa eksistensi hakim mempunyai arti yang sangat penting untuk terlaksananya suatu hukum. Disinilah posisi hakim dalam perannya sebagai salah satu elemen pokok yang sangat berpengaruh, serta mutlak adanya didalam lembaga Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>20</sup>

Hakim dalam rangka mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan, yang menyelesaikan suatu perkara dengan beberapa hal yang sangat perlu diperhatikan dan diketahui untuk ditempuh oleh seorang hakim, yakni:<sup>21</sup>

- a. Mengkonstatir peristiwa hukum, dalam arti melihat atau membenarkan telah terjadinya peristiwa tersebut.
- b. Mengkualifikasi hukum, yakni melihat hubungan hukum terhadap peristiwa itu. Dengan kata lain, menemukan hukumnya dalam peristiwa yang telah dikonstatir.

---

<sup>19</sup> Katon Y. Stefanus. *Op. cit*, h. 57.

<sup>20</sup> Yahya Harahap. *Op. cit*, h. 63.

<sup>21</sup> Wahyu Affandi. *Hakim Penegak Hukum*. Alumni. Jakarta. Hal 67.

- c. Mengkonstatir atau memberi konstitusi, hal ini berarti hakim menemukan hukumnya.

Setelah itu hakim mencari kepastian hukum melalui hasil penemuan hukum, tentang sejauh mana kebenaran bukti-bukti dalam peristiwa yang diajukan, apabila bukti-bukti yang diajukan dalam peristiwa yang diajukan tersebut tidak benar maka si tertuduh (termohon) dianggap tidak bersalah (praduga tak bersalah).<sup>22</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa:

“ Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan, guna menegakkan Hkum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia”.

Jadi jelaslah bahwa ketentuan yang diperlukan bagi kebebasan hakim / Pengadilan sebagai sarana pencegahan dan bahkan menindak atau menghukum pelaku gangguan yang menghambat jalannya peradilan. Dengan demikian kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari prinsip negara hukum yang demokratis, prinsip tersebut diperlukan untuk melindungi kekuasaan kehakiman dari intervensi, bujukan, rayuan, paksaan maupun pengaruh lembaga, teman sejawat, atasan atau pihak-pihak lain, sehingga hakim dalam memutus perkara hanya demi keadilan berdasarkan hukum, rasa keadilan, dan hati nurani.

---

<sup>22</sup> Roihan A. Rasyid. 1995. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Raja Grafindo. Jakarta. Hal 47.

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi dan wewenang peradilan, dengan tujuan utamanya adalah amat kemerdekaan yang diberikan kepada badan peradilan, agar pejabat fungsional yakni para hakim yang memeriksa dan memutus perkara benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Karena hanya peradilan yang bebas dan merdeka yang dapat diprediksikan menegakkan hukum dan keadilan yang hakiki, demikian pula halnya kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka yang dapat menjamin tegakaknya “Negara Hukum”.<sup>23</sup>

Oleh karena itu, sudah selayaknya para hakim yang bertugas di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara harus memahami secara sadar penegasan penjelasan umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 dan yang dikehendaki oleh kekuasaan kehakiman yang tertuang didalam Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara RI 1945. Hal ini memberi isyarat kepada seorang hakim bahwa didalam melaksanakan tugasnya seorang hakim bebas dari campur tangan kekuasaan manapun khususnya pemerintah, dengan sendirinya ia harus bijaksana dan tetap meperhatikan tanggung jawab dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, agar kiranya kebebasan yang telah dipercayakan kepadanya tidak disalahgunakan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Wahyu Affandi. *Op. cit*, h. 73.

<sup>24</sup> “*Keterpurukan Hukum, Penyebab dan Solusi*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hal 58.

## **8. Asas Kebebasan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara**

Hakim dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 menyangkut masalah penegasan kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam Undang-undang ini telah ditentukan aparat yang berfungsi melaksanakan pengawasan dan pembinaan, tidak melanggar asas kebebasan hakim. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004:

- (1) Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara.

Demikian pula pembinaan dan pengawasan umum yang diatur dalam Pasal 13 Bahwa:

1. Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung.
2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara.

Selain pasal-pasal yang telah dikemukakan diatas juga terdapat asas kebebasan yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tetang Pengadilan Umum menyebut bahwa pembinaan teknis yang berada ditangan Mahkamah Agung serta pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan berada ditangan Menteri Kehakiman tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kebebasan hakim dalam memutus perkara, antara lain:<sup>25</sup>

1. Faktor gangguan dari manusia yang berada diatas atau disamping hakim tersebut.
2. Faktor lingkungan, terutama kehidupan ekonominya begitu pula tingkat kecerdasan dan pengetahuan tentang hukum.

Dari kedua faktor tersebut yang dikemukakan diatas telah menjadi fakta selama ini, akhirnya masyarakat merasa skeptis dan sulit untuk menerima ketentuan formal bahwa hakim dalam memutus perkara betul-betul bebas dalam menerapkan Undang-undang tanpa diintimidasi oleh pihak luar yang tidak ditetapkan oleh Undang-undang.<sup>26</sup>

### ***B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegak Hukum***

Menurut Satjipto Rahardjo, berbicara mengenai penegakan hukum, pada hakekatnya berbicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep yang abstrak. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.

---

<sup>25</sup> Kusumadi Pudjosewojo. *Pdoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Universitas. Hal 45.

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo. *Op. cit*, h. 23.

Menurut Soerjono Soekanto, Penegakan hukum merupakan salah satu sistem yang terdiri dari:<sup>27</sup>

1. Kaidah hukum
2. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkannya
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum
4. Warga masyarakat yang terkena akan dapat mendukung pelaksanaan hukum tersebut.

Menurut Pamdo Wahjono, keempat faktor diatas saling berkaitan dan merupakan inti dari sistem penegakan hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing, penegakan hukum sebagai pengayom masyarakat yang jujur, bersih, tegas, dan adil dalam rangka mewujudkan pemerataan sebagai proses peradilan lebih sederhana, cepat dan tepat dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.<sup>28</sup>

Penegak hukum mencakup hakim, polisi, jaksa pembela, petugas permasyarakatan. Tatanan nilai perundang-undangan sebenarnya cukup baik tetapi mental penegak hukum yang kurang efektif terhadap penegak hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum adalah:<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> “*Faktor Penegakan Hukum*”. Wikipedia. 2007.  
<http://wikipedia.org/wiki/faktor-penegakan-hukum/html> (3 Januari 2007).

<sup>28</sup> Yahya Harahap. *Op. cit*, h. 29.

<sup>29</sup> “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”. Wordpress. 2008.  
<http://t1g3rs.wordpress.com/2008/12/30/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-2/> (30 Desember 2008).

1. Faktor hukum itu sendiri.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk hukum maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut diberlakukan atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan.

Kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diatas mengandung pengertian bahwa hukum di Indonesia sebenarnya sudah cukup memadai, yang mesti diperbaiki adalah moral dan mentalitas para penegak hukum. Faktor penegakan hukum adalah hakim itu sendiri, sebab hakimlah yang menentukan fakta hukum pada suatu kasus yang diajukan kepadanya.

Penegak Hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Faktor sarana dan fasilitas sangat mempengaruhi hasil putusan hakim. Faktor masyarakat, dapat mempengaruhi penegakan hukum oleh hakim diwilayah mana iya bertugas untuk menerapkan hukum oleh hakim dalam memutus perkara. Hakim harus



memperhatikan, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>30</sup>

### ***C. Kebebasan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Memutus Sengketa***

Menurut Arbijoto<sup>31</sup>, kebebasan eksistensial bukan berarti lepas dari segala kewajiban atau kekhawatiran dan tanggung jawab, melainkan kebebasan sebagai makna eksistensinya selaku manusia, kemandiriannya selaku manusia. Sedangkan kebebasan hakim dalam kapasitasnya sebagai makhluk individu mempunyai kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensinya sebagai manusia. Adanya paksaan, ikatan, beban adalah merupakan alienasi yang menekan manusia sedemikian rupa sehingga menghalang-alangi pelaksanaan dirinya sebagai manusia yang utuh dan mandiri.<sup>32</sup> Kebebasan sebagai arah dan tujuan hidup selaku manusia, adalah kebebasan yang sifatnya sedemikian rupa sehingga orangnya bebas dari aneka ragam alienasi yang menekannya dan bebas pula untuk kehidupan yang utuh, tidak tercela, berdikari dan kreatif, dalam arti kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensi manusia.<sup>33</sup>

Sebagai suatu proses, penegakan hukum tidak pernah selesai karena salah satu yang ditegakkan adalah keadilan yang merupakan nilai yang tidak dapat dimaknai

---

<sup>30</sup> Bambang Waluyo. 1992. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Sinar Grafindo. Jakarta. Hal 49.

<sup>31</sup> Arbijoto, *Kebebasan Hakim (refleksi Terhadap Manusia Sebagai Homo Relegiosus)*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2000), hal. 95.

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama*, (Jakarta: Al-Hikmah, Jakarta, 1994), hal. 28.

<sup>33</sup> Mura Hutugulung. 1996. *Penegakan Hukun dan Pembaruan Hukum*, Liberty, hal 45.

secara subyektif. Oleh karena itu menurut Soepomo, hakim dalam melaksanakan tugasnya menurut adat terikat dan bebas untuk meninjau secara mendalam apakah putusan-putusan yang diambil pada waktu yang lampau masih dapat dipertahankan berhubung adanya perubahan-perubahan di dalam masyarakat disebabkan adanya pertumbuhan rasa keadilan yang baru dalam masyarakat.<sup>34</sup>

Manusia sebagai makhluk individu mempunyai kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensinya. Jika dikatakan bahwa setiap manusia menginginkan kebebasan bagi dirinya sendiri, maka yang dimaksudkan dengan pernyataan ini bukanlah kebebasan dalam arti “lepas dari segala kewajiban atau kekhawatiran dari tanggung jawab” melainkan kebebasan sebagai makna eksistensinya selaku manusia, kemandiriannya selaku manusia.<sup>35</sup>

#### ***D. Kerangka Pikir***

Terwujudnya asas kebebasan Hakim yang berkeadilan dalam memutus suatu perkara diambil atas dasar kewenangan yang diberikan, namun disisi lain pelaksanaan keputusan tidak boleh mengurangi hak-hak warga negara. Tindakan hukum Badan / Pejabat Tata Usaha Negara dituangkan dalam bentuk keputusan tertulis, dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan. Setiap keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara

---

<sup>34</sup> Muhammad Salam Mudzkur. 1964. *Hukum dan Keadilan*. Sinar Grafindo, hal 73.

<sup>35</sup> Muhammad Salam Mudzkur. *Op. cit*, hal 68.

harus berdasarkan prinsip negara hukum, oleh karena itu keputusan tersebut tidak boleh melanggar hak-hak warga negara.

Dalam hal Kekuasaan Kehakiman yang di atur dalam UUD 1945 Bab IX, Pasal 24 ayat (2) dinyatakan bahwa:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Dan dengan kalimat yang sama, dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa:

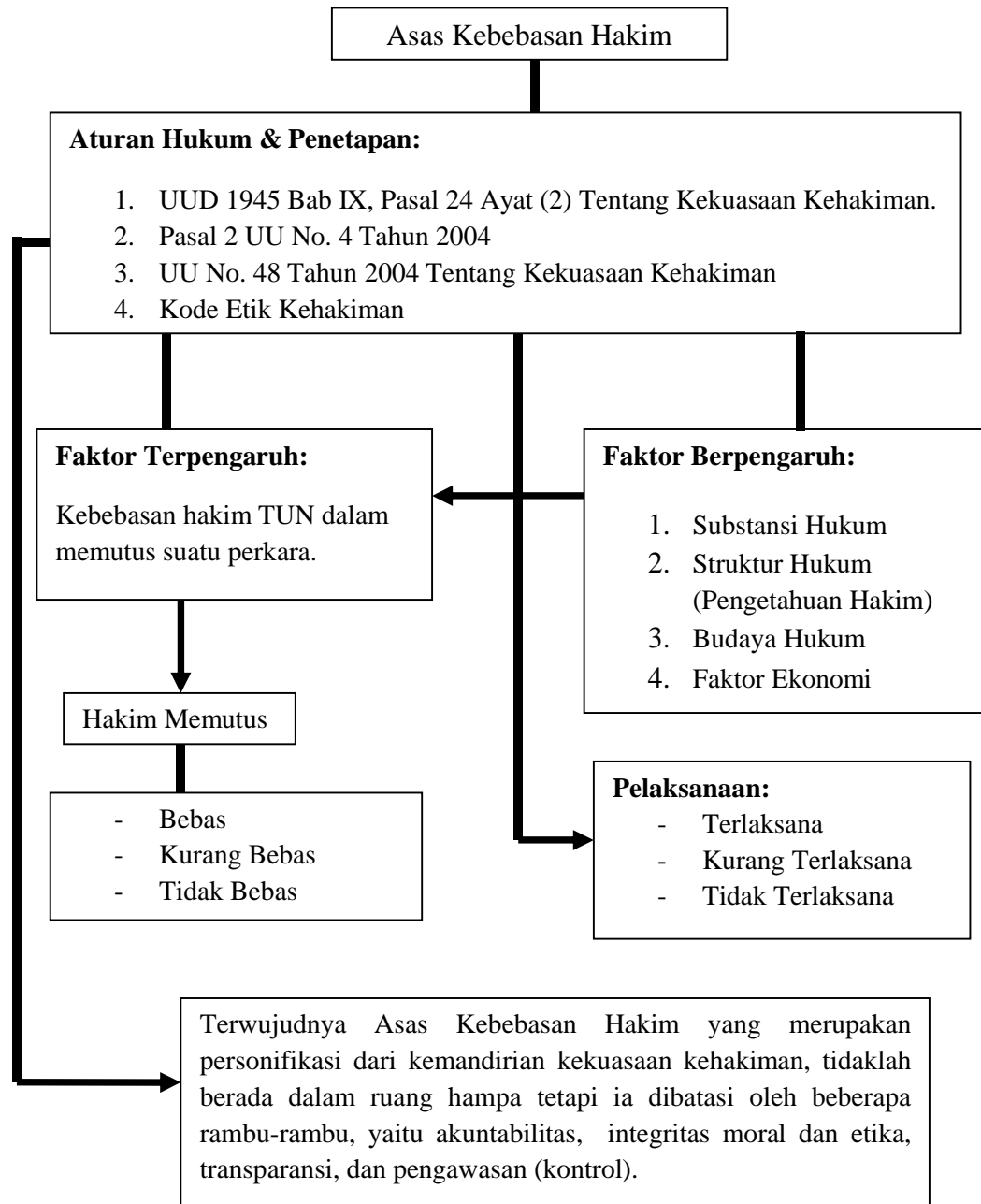
“ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung adalah meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. “

Dalam undang-undang No. 5 Tahun 1986 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 memiliki alasan dikarenakan dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan demi penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Didalam Kode etik Kehakiman, wewenang dan tugas pengawasan diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan

Salah satu hal yang penting disorot masyarakat untuk mempercayai Hakim, adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim.

### E. Diagram Kerangka Pikir



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Jenis Penelitian***

Penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian hukum dengan fokus kajian pendekatan Sosiologis Yuridis. Pendekatan yuridis dilakukan dengan cara analisis induktif dengan melakukan pengamatan terhadap perangkat hukum yang erat kaitannya dengan asas kebebasan hakim. Sedangkan dengan pendekatan Sosiologis dengan menganalisa pelaksanaan kebebasan hakim dalam memutuskan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

##### ***B. Lokasi dan Waktu Penelitian***

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Dipilihnya lokasi tersebut oleh karena menyangkut beberapa hal tentang kebebasan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Dan disamping itu belum pernah dilakukan penelitian menyangkut kebebasan hakim dalam memutus suatu sengketa.

### ***C. Populasi dan Sampel***

#### **1. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa hakim pada pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan beberapa masyarakat yang pernah bersengketa TUN.

#### **2. Sampel**

Sampel penelitian ini dilakukan dengan cara pemisahan yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Hakim sebanyak 3 orang sebagai Informan, sedangkan untuk Responden diambil masyarakat sebanyak 12 orang. Sehingga jumlah seluruh responden adalah sebanyak 12 orang.

### ***D. Jenis dan Sumber Data***

Jenis dan sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Data Primer**

Pengambilan data primer, yaitu data diperoleh dengan jalan wawancara langsung dari Hakim sebagai Informan dan pengisian kuesioner oleh masyarakat sebagai Responden.

## 2. Data Sekunder

Keseluruhan data dalam bentuk dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian yang diperoleh dari instansi atau lembaga pemerintah terkait. Dalam hubungannya dengan data sekunder, penelitian lebih difokuskan pada kepustakaan yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori hukum normatif, begitu pula terhadap pendapat-pendapat para ahli hukum.

### *E. Teknik Pengumpulan Data*

Untuk menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan analisis. Selanjutnya untuk memperoleh data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Wawancara, yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.
- b. Studi dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan mempelajari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang terkait dengan objek penelitian.



### ***F. Teknik Analisis Data***

Analisis data merupakan hal penting dalam sebuah proses penelitian. Proses analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang diperoleh dari penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya proses penyederhanaan data, agar data-data yang diperoleh akan lebih mudah dibicarakan dan diinterpretasikan sehubungan dengan tujuan akhir adalah memperoleh data yang akurat.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan dengan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subyek, obyek penelitian saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.<sup>1</sup>

Selanjutnya dari data kualitatif yang diperoleh tersebut dirangkum sesuai hasil wawancara terhadap hakim sebagai informan, dan masyarakat sebagai respondennya, yang kemudian digunakan untuk menyusun analisis dan deskripsi tentang Pelaksanaan Asas Kebebasan Hakim dalam memutus Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

---

<sup>1</sup> Bambangunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : RajaGrafindo. H. 143

Tahap berikutnya adalah membandingkan temuan di lapangan tersebut dengan peraturan perundang-undangan ketentuan dari dasar hukum UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, dan Kode Etik Kehakiman. Kesimpulan diambil dengan menggunakan analisa induktif, yang diawali dari suatu perkara yang ditangani oleh Hakim PTUN berdasarkan pengalaman nyata dilapangan untuk kemudian ditarik ke pengertian yang umum.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL**

#### ***A. Kebebasan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus suatu Sengketa.***

Dalam prakteknya, prinsip-prinsip tentang persamaan kedudukan masyarakat di depan hukum lebih tercermin pada cara, sifat, sikap dan suasana kebebasan para hakim dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi, karena hakim dalam memutus sengketa menggunakan *practical reason* tentunya sangat dipengaruhi oleh latar belakang masing-masing individu. Di mana putusan Hakim didalam memutus sengketa Tata Usaha Negara untuk menguatkan pendapat hakim selalu menggunakan keyakinan hakim yang berdasarkan kebebasan yang dimiliki oleh hakim yang berlandaskan pengetahuan, pengalaman yang dimilikinya dan hati nuraninya serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu hakim dengan kebebasannya dalam memutus sengketa selalu dipengaruhi oleh beberapa atribut yang terus melekat pada dirinya, dan tidak bisa hanya memegang prinsip legalitas saja, karenanya juga mendasarkan keutamaan-keutamaan moral.

Hakim sebagai figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara kecerdasan moral dalam meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak. Sebagaimana yang di kemukakan Masdin. SH. Menyatakan bahwa, putusan pengadilan yang adil menjadi puncak kearifan bagi penyelesaian permasalahan

hukum yang terjadi dalam bernegara dan bermasyarakat karena putusan yang berdasarkan keadilan bagi masyarakat tentu sangat diharapkan dan keputusan yang adil tentunya berdasarkan kebebasan hakim dari intervensi dari pihak manapun walaupun kebebasan hakim dalam memutus sengketa tata usaha Negara dinilai belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang.<sup>1</sup>

Sedangkan Irfan Mawardi. SH., menyatakan bahwa, kebebasan hakim dalam melaksanakan tugasnya adalah bebas untuk menggunakan Undang-undang secara tekstual atau tidak dalam arti bebas menyelaraskan undang-undang dengan keadaan sewaktu putusan dijatuhkan dengan mengadakan penafsiran interpretasi apabila peraturan perundang-undangannya tidak atau kurang jelas, dan mengkonstruksi hukum apabila undang-undangnya tidak menjelaskan secara kongkrit tentang suatu masalah tertentu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Masdin, Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Sulsel, wawancara oleh penulis di Makassar. 2 Mei 2013..

<sup>2</sup> Irfan Mawardi, Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Sulsel, wawancara oleh penulis di Makassar. 4 Mei 2013..

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, peneliti memperoleh data dari responden tentang kebebasan hakim dalam memutus sengketa sebagaimana tabel 1 berikut :

Tabel 1

## Pernyataan Responden terhadap Putusan Hakim

No.	Kategori Bebas	Frekuensi	Presentase
1.	Bebas	6	50,00 %
2.	Kurang Bebas	4	30,00 %
3.	Tidak Bebas	2	20,00 %
	Jumlah	12	100.00 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 12 responden 6 atau 50,00 % diantaranya menyatakan hakim bebas dalam menyelesaikan suatu sengketa. 4 atau 30,00 % menyatakan bahwa hakim kurang bebas dalam memutus suatu sengketa dan 2 atau 20,00 % diantaranya menyatakan hakim dalam memutus suatu sengketa tidak bebas. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah menganggap hakim dalam memeriksa dan memutus suatu sengketa adalah bebas. Dalam arti bahwa Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar setelah ditunjuk sebagai Hakim Majelis pada saat itu pula bebas tanpa dipengaruhi oleh Ketua Pengadilan. Akan tetapi masi ada responden diantaranya menyatakan bahwa hakim kurang bebas dalam memutus suau sengketa dan sebagian kecil

responden menyatakan hakim tidak bebas dalam memutus sengketa. Agar pencari keadilan dapat merasa puas terhadap proses peradilan.

Menurut Sutyono. S.H., M.H. mengatakan bahwa, Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa tidak boleh bertanggungjawab kepada atasannya akan tetapi bertanggungjawab kepada nuraninya dan kepada Tuha Yang Maha Esa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Namun satu hal yang perlu diakui bahwa peraturan-peraturan hukum tertulis yang telah ada dan berlaku di Negara Indonesia terkadang tidak mampu mengikuti perkembangan dan perubahan masyarakat, sehingga yang paling efektif dilaksanakan penemuan hukum oleh hakim yang mengisi kekosongan hukum akibat perkembangan masyarakat yang begitu dinamis.<sup>3</sup>

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan tidaklah cukup dengan berpegang pada pertimbangan menurut undang-undang sebab semakin majunya teknologi dan dalam masyarakat banyak kemajuan ternyata menyebabkan peningkatan bentuk-bentuk kejahatan.

---

<sup>3</sup> Sutyono, Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Sulsel, wawancara oleh penulis di Makassar. 7 Mei 2013..

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam melakukan penemuan hukum oleh hakim apabila rumusan normatif suatu undang-undang bersifat kabur, pertentangan norma, dan kekosongan hukum, maka hakim menggunakan penemuan hukum melalui penafsiran bebas terikat.

Untuk membuktikan tingkat pelaksanaan kebebasan hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang diperoleh peneliti melalui responden yang bersengketa dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 2

## Pernyataan Responden yang telah bersengketa

No.	Kategori Bebas	Frekuensi	Presentase
1.	Bebas	3	20,00 %
2.	Kurang Bebas	7	70,00 %
3.	Tidak Bebas	2	10,00 %
	Jumlah	12	100.00 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 12 responden yang telah bersengketa, 3 atau 20,00 % diantaranya menyatakan hakim bebas dalam menyelesaikan suatu sengketa tata usaha negara. 7 atau 70,00 % menyatakan bahwa hakim kurang bebas dalam memutus suatu sengketa. 2 atau 10,00 % diantaranya menyatakan hakim dalam memutus sengketa tidak bebas. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menganggap bahwa keadaan hakim

dalam menyelesaikan suatu sengketa adalah bebas dari campur tangan atau tidak mendapat gangguan dari pihak luar, yang dapat menimbulkan kontradiksi dikalangan masyarakat luas.

Dari pernyataan diatas dapat dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha negara Makassar masih terdapat putusan hakim yang dianggap tidak mencerminkan perasaan keadilan masyarakat, untuk mengembalikan citra dan wibawa peradilan hakim seharusnya dalam memutus suatu sengketa yan dihadapinya dapat diselesaikan secara konseptual serta menyeluruh supaya dapat memberikan ketengangan dan ketentraman.

Hukum seharusnya perlu di wujudkan dalam upaya pemerintah untuk memperoleh perasaan keadilan bagi masyarakat luas. Secara konkrit harus terjabar dalam upaya penerapan hukum, penegakan hukum dan terutama pelayanan kepada masyarakat agar pencari keadilan dapat merasakan perasaan adil.

Sebagaimana yang dikemukakan Abdullah salah satu anggota masyarakat yang pernah bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, bahwa putusan pengadilan dinilai kurang mencerminkan perasaan keadilan hukum masyarakat berdasarkan nila-nilai yang hidup dan tumbuh di masyarakat itu dapat dilihat dari putusan Pengadilan jika masyarakat menengah kebawah bersengketa dengan pemerintah atau kalangan pengusaha dimana putusan itu dinilai oleh publik dapat mencederai keadilan hukum masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Abdullah, Anggota Masyarakat yang telah bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Sulsel, wawancara oleh penulis di Makassar. 11 Mei 2013..



Hal yang samapun di aminkan oleh Ahmad yang pernah bersengketa di Pengadilan dan dia mengatakan putusan pengadilan masih tebang pilih sehingga keadilan belum sepenuhnya belum dirasakan oleh masyarakat kecil.<sup>5</sup>

Untuk itu menurut penulis pengadilan harus melakukan terobosan hukum dimana *mindset* yang selama ini dikuasai oleh pandangan positifis harus diubah dengan mindset sosiologis Yuridis yan dimana mementingkan aspek kepentingan sosial juga aspek kepentingan hukum dan tidak mengesampingkan masyarakat yang lebih besar.

Sehingga putusan pengadilan tidak akan selalu mendapatkan perlawanan dari masyarakat karena dianggap lebih mementingkan kepentingan pemerintah dan pengusaha atau hal elit tertentu jika berhadapan dengan kepentingan masyarakat. Maka dari itu seorang Hakim dalam memutus suatu sengketa mestinya mempertimbangkan kebenaran Sosiologis (sosial), Yuridis (Hukum) dengan kebenaran Filososif (keadilan). Seorang hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi di masyarakat.

---

<sup>5</sup> Ahmad, Anggota Masyarakat yang telah bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Sulsel, wawancara oleh penulis di Makassar. 11 Mei 2013..

## ***B. Pelaksanaan Asas Kebabasan Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar***

### **1. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim**

Hakim Harus Berperilaku Adil. Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.

Hakim harus berperilaku Jujur, kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

Hakim harus Berperilaku Arif dan Bijaksana, Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana

mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

Hakim harus Bersikap Mandiri, Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

Hakim harus Berintegritas Tinggi, Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.<sup>6</sup>

Hakim harus Bertanggungjawab, Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

---

<sup>6</sup> Wahyu Affandi. 1984. *Hakim Penegak Hukum*. Alumni, Jakarta. Hal 23.

Hakim harus Menjunjung Tinggi Harga Diri, Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.

Hakim harus Berdisiplin Tinggi, Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

Hakim harus Berperilaku Rendah Hati, Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

Hakim harus Bersikap Profesional, Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.

Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.<sup>7</sup>

## 2. Asas dalam Hukum Acara PTUN

- “Asas praduga *rehtmatige* (benar menurut hukum, *presumptio iustea causa*), asas ini menganggap bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap berdasarkan hukum (benar) sampai ada pembatalan. Dalam asas ini gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang digugat (Pasal 67 ayat (1) UU No.5 tahun 1986);
- “Asas pembuktian bebas”. Hakimlah yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan 1865 BW (lihat Pasal 101, dibatasi ketentun Pasal 100;
- ”Asas keaktifan hakim (*dominus litis*)”. Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak yang tidak berimbang (lihat Pasal 58, 63, ayat (1) dan (2), Pasal 80 dan Pasal 85)
- ”Asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat (*erga omnes*)”. Sengketa TUN adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian putusan pengadilan berlaku bagi siapa saja-tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa;

---

<sup>7</sup> Ibid., h. 33-34.

- dan asas-asas peradilan lainnya, misalnya : asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, obyektif.
- “Asas para pihak harus didengar (*audi et alteram partem*)”, para pihak mempunyai kedudukan yang sama;
- “Asas kesatuan beracara” (dalam perkara yang sejenis);
- “Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas” (Pasal 24 UUD 1945 Jo. Pasal 1 UU No. 4 2004);
- “Asas sidang terbuka untuk umum”~putusan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 70 UU PTUN);
- “Asas pengadilan berjenjang” (tingkat pertama (PTUN), banding (PT TUN), dan Kasasi (MA), dimungkinkan pula PK (MA);
- “Asas pengadilan sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*)”, sengketa sedapat mungkin diselesaikan melalui upaya administrasi (musyawarah mufakat), jika belum puas, maka ditempuh upaya peradilan (Pasal 48 UU PTUN);
- “Asas obyektivitas”, lihat Pasal 78 dan 79 UU PTUN).
- Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Sebagaimana telah dikemukakan Irfan Mawardi. SH. Hakim Penadilan Tata Usaha Negara Makassar, bahwa cara pelaksanaan asas kebebasan hakim di PTUN Makassar itu hakim wajib menggali nilai keadilan dalam masyarakat sesuai dengan putusan yang diperkarakan meskipun itu tidaklah mudah untuk dilaksanakan, didalam peradilan seorang hakim harus selektif dalam memutus suatu sengketa.

Oleh karena itu, kepentingan (hak) dalam hubungannya dengan keputusan TUN yaitu seseorang harus dapat menunjukkan bahwa keputusan TUN yang di gugat itu merugikan dirinya secara langsung. Hanya keputusan TUN yang menimbulkan akibat hukum yang dihendaki oleh Badan / Pejabat TUN.<sup>8</sup>

### ***C. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kebebasan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus suatu sengketa.***

#### **1. Faktor Pengetahuan Seorang Hakim**

Pengetahuan merupakan potensi intelektual para penegak hukum, khususnya para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Kemampuan seorang hakim Pengadilan Tata Usaha Negara sangat penting dalam menetapkan hukum terhadap pencari keadilan karena akan memberikan ketenangan, ketentraman yang kondusif. Tingkat pengetahuan dan latar belakang pendidikan seorang hakim sangat diutamakan, sebab yang dijadikan indikator dalam memeriksa dan

---

<sup>8</sup> Irfan Mawardi, Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Sulsel, wawancara oleh penulis di Makassar. 4 Mei 2013..

memutus sengketa adalah beedasarkan buku-buku yang telah dipelajari dan pendapat ahli hukum mana yang figurnya sangat diprioritas pemikirannya, karena jika hakim memiliki ketrerbatasan pengetahuan akan mendapatkan berbagi tantangan karena pengetahuan masyarakat dapat menilai penetapan hakim melalui dari hari putusan manapun dari tinkat pendidikan hakim, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3

## Pernyataan RespondenTingkat Pengetahuan Hakim

No.	Kategori Bebas	Frekuensi	Presentase
1.	Mengetahui	6	60,00 %
2.	Kurang Mengetahui	5	40,00 %
3.	Tidak Mengetahui	3	30,00 %
	Jumlah	12	100.00 %

Dari data diatas terdapat 12 responden, 6 atau 60,00 % diantaranya menyatakan tentang pengetahuan hakim terhadap hukum cukup tinggi. 5 atau 40,00 % diantaranya menyatakan tentang pengetahuan hakim terhadap hukum adalah Kurang, dan 4 atau 30,00 % diantaranya menyatakan tentang pengetahuan hakim adalah tidak mengetahui. Hal ini dapat dipahami bahwa pada umumnya responden menyatakan pengetahuan hakim tentang hukum adalah tinggi dengan berdasarkan dari tingkat pendidikan dan kemampuan dalam memutus suatu parkara, akan tetapi masih dapat responden diantaranya 5 atau 40,00 % dan 3 atau



30,00 % menyatakan bahwa pengetahuan hakim masih sedang, dan rendah dengan pernyataan responden menilai dari hasil putusan hakim itu sendiri.

## 2. Faktor Budaya dari Seorang Hakim

Eksistensi hakim adalah sebagai penegak hukum dan keadilan, akan tetapi putusan yang dijatuhkan kepada pencari keadilan seringkali dipengaruhi faktor budaya. Menurut responden adalah faktor kesukuan dan dimana seorang hakim bertempat tinggal, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4

Pernyataan Responden Pengaruh Budaya terhadap Putusan Hakim

No.	Kategori Bebas	Frekuensi	Presentase
1.	Tinggi	3	35,00 %
2.	Sedang	7	50,00 %
3.	Rendah	2	15,00 %
	Jumlah	12	100.00 %

Data diatas terdapat 12 responden. 3 responden atau 35,00 % menyatakan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dipengaruhi oleh faktor budaya adalah tinggi. Dan 7 atau 50,00 % diantaranya menyatakan hakim dalam memutuskan perkara yang diajukan kepadanya seringkali dipengaruhi oleh faktor budaya adalah sedang, dan 2 atau 15,00 % responden menyatakan bahwa putusan

hakim dipengaruhi oleh faktor budaya adalah rendah. Hal ini yang merusak citra lembaga peradilan sebagai tempat tegaknya hukum secara adil.

### 3. Faktor Ekonomi dari Seorang Hakim

Ekonomi merupakan salah satu yang sangat vital bagi semua orang, akan tetapi faktor ekonomi dapat saja menjatuhkan martabat seseorang bila idak pandai bersyukur dan takut akan konsekuensinya. Hakim dalam melaksanakan tugasnya juga sering dipengaruhi oleh faktor ekonomi, atau menurut responden adalah faktor kebutuhan hakim sebagai mana dilihat pada tabel 5 berikut :

Tabel 5

Pernyataan Responden yang telah bersengketa

No.	Kategori Bebas	Frekuensi	Presentase
1.	Tinggi	4	35,00 %
2.	Sedang	6	50,00 %
3.	Rendah	2	15,00 %
	Jumlah	12	100.00 %

Data diatas terdapat 12 responden yang telah bersengketa, 4 atau 35,00 % diantaranya menyatakan bahwa faktor ekonomi sering dipengaruhi putusan hakim terhadap pencari keadilan adalah tinggi. 6 atau 50,00 % diantaranya menyatakan bahwa pengaruh ekonomi dalam putusan hakim adalah sedang, dan 2 atau 15,00

% diantaranya menyatakan bahwa pengaruh ekonomi terhadap putusan hakim adalah rendah. Hal ini dapat dikatakan bahwa dari tida kategori diatas umumnya responden menyatakan bahwa pengaruh ekonomi terhadap putusan hakim adalah rendah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan dari permasalahan dan hasil penelitian tentang “*Pelaksanaan Asas Kebebasan Hakim dalam Memutus Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar*”. Maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebebasan Hakim merupakan personifikasi dari kemandirian kekuasaan kehakiman, tidaklah berada dalam ruang kosong tetapi ia dibatasi oleh beberapa hal, yaitu Akuntabilitas, Integritas moral dan etika, Transparansi, dan Pengawasan (kontrol), yang dalam hubungan dengan tugasnya sebagai hakim, maka indenpendensi hakim masih harus dilengkapi lagi dengan sikap profesionalisme dalam bidangnya.
2. Kebebasan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berdasarkan dari hasil penelitian ialah telah terwujud dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang.
3. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi seorang hakim dalam memeriksa dan memutus suatu sengketa yang dipertanggungjawabkan kepadanya adalah kurangnya pengetahuan seorang hakim terhadap aturan hukum yang masih

minim, faktor budaya dari seorang hakim, dan faktor ekonomi dari seorang hakim.

### ***B. Saran***

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Implementasi suatu peraturan perundang-undangan yang telah ada selama ini hendaknya dilaksanakan secara efektif sesuai dengan perintah undang-undang yang mengatur tugas, fungsi, hak, dan kewajiban serta tanggungjawab.
2. Kepada pejabat dalam lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara kiranya dapat mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang sudah ada dalam lembaga peradilan, selain itu dukungan oleh semua pihak khususnya dalam lingkungan peradilan itu sendiri sangat diharapkan untuk mendukung tercapainya tujuan peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah kepentingan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoerraef. *Al Qura'an dan Ilmu Hukum*. karya unipress. Jakarta. 1970.
- Affandi, Wahyu. *Hakim Penegak Hukum*. Alumni, Jakarta. 1984.
- Ali, Ahmad. *MenguakTabir Hukum – Edisi Kedua*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1996.
- Arbijoto. *Kebebasan Hakim (refleksi Terhadap Manusia Sebagai Homo Relegiosus)*. Mahkamah Agung RI. Jakarta. 2000.
- Azhari, Muhammad Tahir. *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta. 1992.
- Departemen Agama RI. *Syaamil Al-Quran The Miracle 15 in 1*. PT. Sygma Examedia Arkanleema. Jakarta
- Harahap, Yahya. *Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan*, Pustaka Kartini. Jakarta. 1989.
- Hutugulung, Mura. *Penegakan Hukum dan Pembaharuan Hukum*, Liberty. 1996.
- Lopa, Baharuddin. *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta. 1987.
- Loudoe, Jhon Z. *Menemukan Melalui Tafsir dan Fakta*, Bina-Aksara, Jakarta. 1985.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Penerbit : Ghalia Indonesia. 2004.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta. 1982.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty. Yogyakarta.
- , *Keterpurukan Hukum Penyebab dan Solusi*, Ghalia Indonesia
- Mudzkur, Muhammad Salam. *Hukum dan Keadilan*, Sinar Grafindo. 1964.
- Pudjosewojo, Kusumadi. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Universitas.

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta. 1995.

Stefanus, Katon Y. *Mengenal Peradilan Kepegawaian Indonesia*, Pustaka Pelajar. 1995.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta. 1997.

Wahyono, Bambang. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bina-Aksara. 1992.

Yulfris, Dedy. *Kedudukan Hakim*, Raja Grafindo, Jakarta. 2010.

Yurisprudensi Badan Peradilan Indonesia. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan. Jakarta. 1986.

Perundang-undangan :

Mahkamah Agung Republik Indonesia. T. th. *Himpunan Peraturan Perundang undangan*. Tp. Jakarta

Soenarto. *KUHPer dan KUHAPer*. Grafindo. Jakarta. 1994.

<http://www.google.com/asas-kehakiman-ptun-indonesia>

<http://www.wordpress.com/definisi-hakim-di-indonesia>

<http://www.scribd.com/doc/98387571/Analisis-Putusan-PTUN>

<http://thesaltasin.wordpress.com/2011/02/07/al-maidah-1-25-120-ayat/>

<http://alquran-to-email.blogspot.com/2011/03/surah-3-ali-imran-ayat-60-of-200.html>

[Id.wikipedia.org/wiki/kekuasaan-absolut](http://Id.wikipedia.org/wiki/kekuasaan-absolut)

[Sigitbudhiarto.files.wordpress.com/2012/04/hk-acara-perdata.ppt](http://Sigitbudhiarto.files.wordpress.com/2012/04/hk-acara-perdata.ppt)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**ANDI TENRI ANGKI NAZARUDDIN**, lahir di Ujung Pandang, tanggal 10 September 1991 merupakan anak Pertama dari empat bersaudara dari pasangan Andi Nazaruddin Zainal, S.sos,. MM. dengan dr. Hj. Juliarna Gaffar. Jenjang pendidikannya ditempuh mulai dari SD Negeri 2 Terang – terang Kabupaten Bulukumba pada Tahun 1996. kemudian melanjutkannya pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada SMP Negeri 2 Bulukumba, tahun 2002, lalu kemudian melanjutkan pada jenjang Sekolah Menengah Atas pada SMA Negeri 1 Bulukumba pada tahun 2006, hingga pada tahun 2009 ia melanjutkan pada jenjang Strata satu (S1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Fakultas Syariah & Hukum, Jurusan Ilmu Hukum. Pada jenjang tersebut disamping aktifitas kuliah juga aktif pada beberapa organisasi ekstra dan intra yakni sebagai Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Hukum 2011, dan Anggota Rayon Fakultas Syariah dan Hukum PMII Cab. Makassar Raya.